

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 untuk kendaraan bermotor roda empat merupakan salah satu jenis insentif yang diberikan oleh Pemerintah pada masa pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk lebih meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor roda empat guna mendorong serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini menjadi salah satu bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pendanaannya bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2021 yang mulai berlaku pada bulan Maret hingga Desember 2021.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 untuk kendaraan bermotor roda empat
 - a. Dalam proses implementasi kebijakana, peran aktif Pemerintah dan para pelaku industri sangat penting dalam mendukung keberhasilan pemberian insentif PPnBM DTP ini, mulai dari proses pengusulan,

pembahasan, penyusunan regulasi sampai proses pelaksanaan kebijakan, termasuk evaluasi dan pelaporan.

b. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, penulis melihat bahwa strategi Pemerintah dalam mengambil terobosan sebagai langkah

konkrit yang cepat di tengah kondisi darurat pandemi Covid-19 dalam bentuk kebijakan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 untuk kendaraan bermotor roda empat, merupakan bentuk pilihan kebijakan yang tepat sebagai solusi jangka pendek guna menjaga keberlangsungan dunia usaha serta menstimulasi permintaan masyarakat, khususnya kelas menengah yang sempat tertahan akibat pandemi Covid-19.

2. Dampak atau daya dorong dari kebijakan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 terbukti mampu membawa perubahan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor roda empat, serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi secara nasional.

a. Dilihat dari data produksi kendaraan bermotor, dimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2019, produksi sebesar 1,2 juta unit, kemudian memasuki pandemi Covid-19 di tahun 2020, produksi menurun secara signifikan menjadi 690 ribu unit atau mengalami penurunan 46,37%. Setelah adanya pemberian insentif

PPnBM DTP Tahun 2021 mampu mendorong peningkatan produksi menjadi 1,1 juta unit atau mengalami peningkatan sebesar 62,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terus membaik, dimana produksi di tahun 2022 mencapai 1,4 juta unit atau meningkat kembali sebesar 31,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Dilihat dari data penjualan kendaraan bermotor, kondisi penjualan kendaraan bermotor roda empat di tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, berada di angka 1,03 juta unit. Namun pada saat terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020, penjualan mengalami penurunan hingga 48,32%, dimana produksi pada saat itu hanya 532 ribu unit. Setelah adanya kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021, jumlah penjualan mengalami peningkatan menjad 887 ribu unit atau meningkat sebesar 66,64%. Kondisi peningkatan ini masih tetap bertahan hingga tahun 2022, dimana jumlah penjualan sebesar 1,04 juta unit atau meningkat sebesar 18,13%.

c. Seiring dengan meningkatnya produksi dan penjualan, maka pada laju pertumbuhan di sektor alat angkutan juga mengalami perbaikan, dimana di tahun 2019 laju pertumbuhan masih menunjukkan angka yang negatif sebesar -3,43%, dan di tahun 2020 sebesar -19,98%, tetapi di tahun 2021 laju pertumbuhannya sudah mulai menunjukkan angka yang positif menjadi 17,82% dan tahun 2022 sebesar 10,67%.

d. Demikian halnya dengan data PDB Nasional, seiring meningkatnya produksi dan penjualan kendaraan bermotor sebagai salah satu penopang perekonomian, pertumbuhan PDB juga menunjukkan angka positif, dimana di tahun 2019 pertumbuhan PDB sebesar 5,02%, sementara di tahun 2020 karena terjadinya pandemi Covid-19 mulai menurun hingga -2,07%, namun dengan adanya berbagai kebijakan Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional di tahun 2021 mampu membawa perbaikan pada pertumbuhan PDB yakni sebesar 3,70% dan pertumbuhan ini terus naik hingga tahun 2022 di angka 5,31%.

B. Implikasi Teori

Berdasarkan analisa terhadap kelima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan dalam teori Grindle terkait dimensi isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup variabel strategi, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, dan pelaksana kebijakan, secara umum menunjukkan bahwa implementasi kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 untuk kendaraan bermotor tertentu yang terkonfirmasi masuk atau tertuang di dalam regulasi teknis, baik berupa Peraturan Menteri Keuangan maupun Keputusan Menteri Perindustrian, sudah terimplementasikan dengan baik, dimana setiap unsur kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat sudah terakomodir dan terkomunikasikan, sehingga kebijakan berjalan sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai. Kendatipun, untuk variabel sumber daya, yang mencakup dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tidak tercantum di dalam isi kebijakan, baik Peraturan Menteri Keuangan maupun Keputusan Menteri Perindustrian, karena variabel sumber daya tersebut dalam teori Grindle pada kebijakan ini sudah tidak diperhitungkan lagi sebab kapasitas SDM, sarana dan prasarana maupun sumber daya finansial dari pemberi pembijakan dan penerima manfaat relatif tersedia.

Disamping itu, dalam Teori Grindle, baik dari *Content of policy* maupun *Context of policy*, mempunyai kelemahan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, karena teori Grindle tidak mencantumkan dimensi *change of policy* (perubahan kebijakan) yang memungkinkan lahirnya kebijakan penopang atau *supporting*, sehingga meskipun dari isi kebijakan misalnya sudah bagus, tetapi tidak ada ruang untuk dirubah. Dimensi *change of policy* ini sebelumnya juga belum pernah dibahas di dalam penelitian lain, khususnya pada penelitian yang menjadi rujukan dalam penulisan tesis ini, sehingga dimensi tersebut dapat disebut sebagai temuan baru (novelty) dari penelitian ini.

C. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian dalam tesis ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah, selaku regulator dalam penyusunan kebijakan, agar kedepannya dapat lebih kreatif lagi untuk mencari berbagai bentuk

kebijakan yang dipilih, sebagai terobosan atau alternatif kebijakan yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan di situasi-situasi khusus dan mendesak, seperti yang dialami pada saat terjadinya pandemi Covid-19.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian terkait dengan dampak *multiplier effect* dari kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) ini, khususnya terhadap sektor-sektor pendukung kendaraan bermotor, seperti industri komponen kendaraan bermotor, sektor jasa atau sektor pendukung lainnya.
3. Perlu adanya dimensi lain terkait *change of policy* (perubahan kebijakan) yang memungkinkan lahirnya kebijakan penopang atau *supporting* untuk mengantisipasi dalam proses implementasi kebijakan.

